

Judul : Keterwakilan di alat kelengkapan Dewan, perempuan bukan sekadar pelengkap
Tanggal : Minggu, 02 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Keterwakilan Di Alat Kelengkapan Dewan Perempuan Bukan Sekadar Pelengkap

FOTO: K. PRINATI



Amelia Anggraini

ANGGOTA Komisi I DPR Amelia Anggraini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal keterwakilan perempuan di pimpinan alat kelengkapan (AKD). Putusan tersebut jadi upaya nyata menuju demokrasi yang lebih setara dan berkeadilan.

Menurut Amelia, selama ini perempuan kerap hanya dilibatkan dalam isu-isu sosial atau kegiatan seremonial. Karena itu, putusan itu jadi penegasan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap demokrasi, tapi bagian utuh dari proses pengambilan keputusan politik di negeri ini.

"Kemampuan dan kepemimpinan perempuan juga dibutuhkan di bidang-bidang strategis, mulai dari ekonomi, pertahanan, hubungan luar negeri, sampai transformasi digital," kata Amelia dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Sebagai anggota Komisi I yang bergelut dengan isu pertahanan dan keamanan, diplomasi, serta kedaulatan digital, dia memahami kompleksitas bidang tersebut. Perempuan punya sensitivitas dan kecermatan yang dibutuhkan untuk membaca arah kebijakan nasional dan global.

"Putusan MK menjadi dasar hukum yang kuat agar perempuan di DPR dapat hadir dan berperan di seluruh ruang strategis kebijakan publik," tegas politikus Partai NasDem itu.

Untuk itu, dia mengajak seluruh fraksi di DPR, terutama yang memiliki jumlah anggota perempuan signifikan untuk segera menyesuaikan tata tertib dan mekanisme internalnya. Sehingga komposisi AKD mencerminkan perimbangan dan pemerataan yang adil bagi perempuan.

"Keadilan representasi tidak lahir dari belas kasih, tetapi dari komitmen institusional yang diatur dan dijalankan secara konsisten," terangnya.

Dia bilang, keterwakilan perempuan juga memperkuat daya empati lembaga legislatif terhadap persoalan riil masyarakat. Terutama bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan. "Saya percaya, saat perempuan diberi ruang setara dalam kepemimpinan politik, DPR akan memiliki perspektif lebih kaya, lebih empati, dan lebih berpihak pada rakyat," katanya.

Menanggapi putusan tersebut, Ketua DPR Puan Maharani memastikan pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut. Pimpinan DPR akan berdiskusi dengan setiap perwakilan fraksi guna merumuskan teknis pelaksanaan putusan MK tersebut di setiap komisi. "DPR tentu menghormati keputusan MK yang secara konstitusional bersifat final dan mengikat," tegasnya.

Ketua DPP PDIP itu mengatakan, separuh dari penduduk Indonesia adalah perempuan. Di DPR periode 2024-2029, keterwakilan perempuan mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, yakni sekitar 21,9 persen atau 127 dari total jumlah keseluruhan 580 anggota.

Kemajuan itu patut diapresiasi, walau masih jauh dari target ideal minimal 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sebagaimana semangat afirmasi kesetaraan gender dalam politik Indonesia. Dia yakin, ke depan akan ada hasil luar biasa dari para legislator perempuan ketika diberi kesempatan. ■ **PYB**